

BAB I

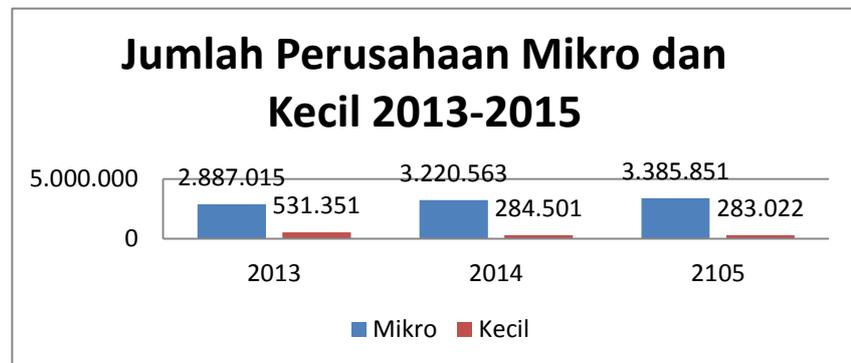
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang, yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM ini sangat berpengaruh pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) serta fleksibilitas dan ketahanan dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. UMKM khususnya usaha mikro merupakan salah satu bidang usaha yang mempunyai peranan yang dominan di negara Indonesia. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi strategis mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95 % dari total jumlah usaha di Indonesia (Kara, 2013 : 317). Perkembangan UMKM tidak dapat diragukan lagi, karena UMKM merupakan bidang usaha yang dapat memberi peluang dalam upaya menciptakan usaha baru. Sehingga, pemberdayaan UMKM merupakan sesuatu yang penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tentang jumlah perusahaan mikro pada tahun 2013-2015 telah mengalami peningkatan yang positif. Hal ini terlihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar 1.1
Jumlah Perusahaan Mikro dan Kecil 2013-2015

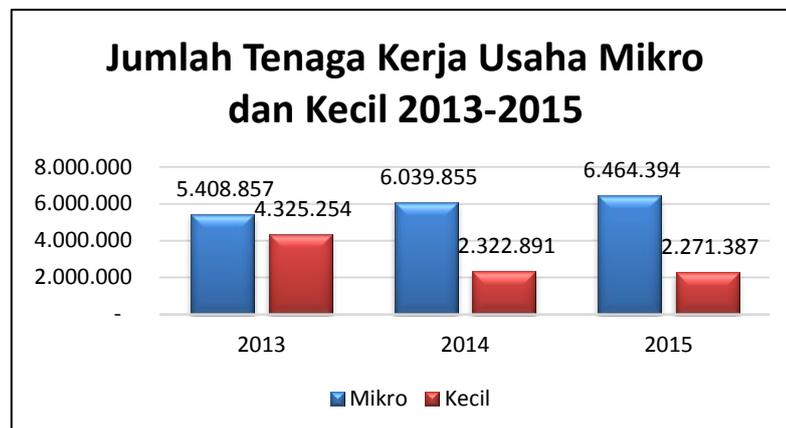


Sumber: BPS telah diolah

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah perusahaan mikro pada tahun 2013 sebanyak 2.887.015 unit, sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 3.220.563 unit, kemudian pada tahun 2015 menjadi 3.385.851 unit. Dengan demikian jumlah usaha mikro mengalami peningkatan sebesar 17,2%. Sedangkan pada usaha kecil terjadi penurunan dari 531.351 (2013) menjadi 284,501 (2014) kemudian menjadi 283.022 (2015). Sehingga diketahui penurunan sebesar 46,7%.

Usaha mikro juga memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada usaha mikro dibuktikan dengan data yang terjadi di tahun 2013 sampai tahun 2015 mengalami kenaikan. Hal ini dibuktikan dengan data grafik di bawah ini :

Gambar 1.2
Jumlah Tenaga Kerja Usaha Mikro dan Kecil 2013-2015



Sumber: BPS telah diolah

Menurut grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja usaha mikro mengalami kenaikan sebesar 19,5% dari 5.408.857 orang (2013), lalu 6.039.855 orang (2014) kemudian menjadi 6.464.394 orang (2015). Sedangkan tenaga kerja usaha kecil di tahun 2013 sebanyak 4.325.254 orang, lalu pada tahun 2014 sebanyak 2.322.891 orang, kemudian menjadi 2.271.387 orang di tahun 2015, menurun sebanyak 47,4%. Hal ini membuktikan bahwa sektor usaha mikro memiliki peran yang besar dalam mengurangi angka pengangguran dan memiliki peran yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Perhatian dan pengembangan terhadap sektor UMKM khususnya usaha mikro merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Usaha mikro memiliki potensi untuk dapat berkembang, namun pada kenyataannya usaha mikro masih mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Selain sebagai

penyerap tenaga kerja dan sebagai salah satu penciptaan PDB, UMKM khususnya usaha mikro masih menghasilkan produktifitas yang rendah. Hal ini disebabkan salah satunya karena pengusaha mikro mengalami keterbatasan modal yang dimiliki. Modal adalah salah satu faktor penting karena dengan adanya modal yang tepat dan pengelolaan yang tepat, maka suatu usaha dapat menjalankan operasionalnya serta mengembangkan usahanya. Usaha mikro yang bermodal kecil tidak sebesar dengan usaha menengah dan besar serta pada umumnya tidak atau belum terdaftar dalam badan hukum, selain itu dalam penerapan manajemennya yang masih sederhana. Di sisi lain, rendahnya produktifitas mengakibatkan pendapatan pengusaha mikro dan pekerja menjadi rendah serta sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Usaha mikro sangat sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan. Pihak perbankan sangat memperhatikan risiko gagal bayar pada usaha mikro serta mengalami kesulitan dalam menilai kelayakan pembiayaan untuk disalurkan kepada usaha mikro. Selain itu, masyarakat menengah ke bawah khususnya pengusaha mikro juga mengalami kesulitan pada prosedur pembiayaannya yang terkesan rumit. Bahkan tidak sedikit masyarakat dan pelaku usaha mikro masih menggantungkan pembiayaan kepada renternir yang tidak memperhatikan keadaan pihak lain dan pelunasannya sangat memberatkan masyarakat. Sehingga pengusaha mikro masih kesulitan untuk dapat mengembangkan usahanya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh modal kerja adalah dengan hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki peran yang strategis dalam usaha pemberdayaan ekonomi rakyat. BMT (*Baitul Maal Wattamwil*) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi yang berdasarkan sistem bagi hasil. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah non bank yang menyediakan permodalan pada sektor mikro. (Sudarsono, 2008 : 103).

Saat ini lembaga keuangan mikro seperti BMT sudah sangat mengalami perkembangan yang pesat. Seperti data yang terdapat dalam berita *online* Republika.co.id tanggal 22 Maret 2015 Pemerintah melalui Kementrian Koperasi dan UKM menyatakan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam bentuk *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT) berkembang sangat signifikan. Hal ini tidak lepas dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun ini telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Dengan perkembangan kinerja tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan UKM Setyo Heriyanto meyakini, BMT akan sangat berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang mampu menggerakkan sektor riil di masyarakat (www.republika.co.id)

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan BMT adalah produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Syafi'i Antonio, 2011:101). Dalam prakteknya, bank atau BMT membeli atau memberikan kuasa kepada nasabah atau anggota untuk membelikan barang yang diperlukan nasabah atau anggota atas nama bank, pada saat bersamaan bank atau BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan (Warkum, 2002:97).

Salah satu BMT yang menjadikan pembiayaan murabahah sebagai salah satu produknya adalah KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta (BIF). Berikut merupakan data pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT BIF berdasarkan akad :

Tabel 1.1

PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD

No.	Akad Pembiayaan	Jumlah	%
1	MURABAHAH	48,193,509,543	67%
2	MUDHARABAH	1,739,401,243	2%
3	MUSYARAKAH	4,118,660,743	5%
4	QORDUL HASAN	1,405,131,243	1%
5	HIWALAH	12,332,666,143	17%
6	IJARAH	5,650,615,343	7%
7	AL QARD	222,444,087	0%
		73,662,428,344	100%

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT BIF 2015

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan yang mendominasi adalah akad pembiayaan murabahah, yaitu sebesar 67%. Hal ini berarti lebih dari setengah dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan menggunakan akad murabahah. Pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT BIF ditujukan untuk usaha produktif dan konsumtif, namun lebih dominan adalah untuk pembiayaan produktif yaitu modal kerja. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk para pelaku usaha produktif dalam upaya mengembangkan usahanya.

KSPPS BMT BIF merupakan salah satu KSPPS BMT yang sudah berkembang di Yogyakarta, hal tersebut dapat dilihat sampai saat ini KSPPS BMT BIF sudah memiliki 10 kantor cabang yang tersebar di wilayah Yogyakarta. KSPPS BMT BIF memang mempunyai fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat kelas menengah ke bawah yaitu untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah khususnya pedagang Pasar Tradisional. Berikut adalah data pembiayaan yang telah disalurkan oleh KSPPS BMT BIF untuk berbagai sektor usaha :

Tabel 1.2
PEMBIAYAAN BERDASARKAN SEKTOR USAHA

No.	Akad Pembiayaan	Jumlah	%
1	PERDAGANGAN	47,427,696,514	66%
2	PETERNAKAN	2,510,262,845	3%
3	PERTANIAN	2,347,666,056	3%
4	KERAJINAN	1,728,879,149	1%
5	KONSUMTIF	3,968,536,833	5%
6	JASA	13,678,136,824	19%
7	INDUSTRI	2,001,250,123	3%
		73,662,428,344	100%

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT BIF 2015

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT BIF paling banyak untuk sektor perdagangan. Hal ini sejalan dengan tujuan berdirinya BMT yaitu sebagai Lembaga Keuangan Mikro untuk mengembangkan usaha-usaha produktif masyarakat menengah ke bawah.

Selain itu, KSPPS BMT BIF dari tahun ketahun telah mengalami pertumbuhan. Misalnya pertumbuhan dapat dilihat dari jumlah anggota KSPPS BMT BIF. Jumlah anggota KSPPS BMT BIF mengalami peningkatan yang signifikan, sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Data Anggota KSPPS BMT
BIF

NO.	DATA	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Penabung	12.890	14.269	16.576	20.941	25.130	29.031	34.556
2.	Peminjam	6.842	7.786	8.646	8.782	9.635	9.873	10.317

Sumber : data sekunder diolah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah anggota KSPPS BMT BIF. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah penabung maupun peminjam dari tahun 2009 sampai 2015. Peningkatan jumlah anggota ini menunjukkan bahwa KSPPS BMT BIF telah menjadi pilihan dan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu lembaga keuangan mikro. Di sisi lain dapat dilihat pada kinerja KSPPS BMT BIF yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan kinerja keuangan KSPPS BMT BIF dapat dilihat data di bawah ini :

Tabel 1.4
Profil Keuangan BMT Bina Ihsanul Fikri Tahun 2008-2014
(dalam jutaan)

Keterangan	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Laba	173.927	196.545	290.670	296.213	410.964	538.370	883.119
Simpanan	16.658.0 00	21.816.9 87	26.634.49 3	34.891.98 4	45.443.1 42	65.802.8 94	78.603.8 00
Pembiayaan	11.284.0 00	13.208.8 81	17.141.05 3	22.624.27 8	36.191.0 65	46.760.0 42	66.604.7 73
Aset	11.823.3 30	15.764.2 03	18.691.84 6	29.104.68 1	32.942.1 02	44.780.8 80	60.024.7 24

Sumber : Profil BMT BIF

Adapun laba pada tahun 2015 sebesar 870.822.011, simpanan sebesar 91.900.418, pembiayaan sebesar 73.662.428.344 dan aset 69.597.242.345. Pada tabel di atas menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan KSPPS BMT BIF yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, dalam memberdayakan masyarakat melalui penyaluran pembiayaan untuk usaha kecil KSPPS BMT BIF memiliki strategi, yaitu bagi anggota pembiayaan KSPPS BMT BIF akan dilakukan pendampingan seperti kunjungan-kunjungan secara berkala dengan melihat perkembangan usaha, memberi masukan, menanyakan kendala-kendala dalam usahanya, serta memberikan peringatan dini kepada anggota apabila terjadi penurunan usaha yang mengandung risiko untuk usaha tersebut. Selain itu KSPPS BMT BIF juga membantu dari segi pemasaran produk usaha anggota. KSPPS BMT BIF juga sering mengadakan *event-event* tertentu untuk mengenalkan usaha anggotanya

kepada masyarakat luas. Seperti yang pernah dilakukan adalah ketika diadakan *event* pameran UMKM tingkat nasional di JEC, pihak KSPPS BMT BIF ikut menampilkan kerajinan dari anggotanya. Melalui acara tersebut produk anggota menjadi lebih dikenal masyarakat luas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perkembangan usaha anggota. Di sisi lain, KSPPS BMT BIF memiliki beberapa penghargaan yang pernah diraih, yaitu tahun 2012 KSPPS BMT BIF mendapatkan *award* sebagai anggota LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) terbaik se-Indonesia yang diselenggarakan di Medan, selanjutnya pada tahun 2013 KSPPS BMT BIF mendapatkan *award* Menteri Koperasi sebagai KSPPS BMT terbaik di Indonesia yang diselenggarakan di Lombok. Kemudian pada tahun 2014 KSPPS BMT BIF mendapatkan *award* keuangan tersehat se-Indonesia dari Menteri Koperasi yang diselenggarakan di Jakarta (Bapak Sutardi, Manajer KSPPS BMT BIF Cabang Bugisan).

KSPPS BMT BIF Cabang Bugisan merupakan salah satu cabang dari KSPPS BMT BIF Yogyakarta. KSPPS BMT BIF Cabang Bugisan juga mempunyai fokus pada pemberdayaan ekonomi produktif. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan penyaluran pembiayaan murabahah untuk para usaha mikro kecil dan menengah, KSPPS BMT BIF Cabang Bugisan mempunyai komunitas binaan atau perkumpulan usaha anggota pembiayaan yang potensial. Komunitas usaha tersebut dibentuk berdasarkan jenis usaha atau tempat usaha, misalnya komunitas pedagang Pasar Legi, komunitas penjual burung Pasar Ngasem, komunitas

pengrajin, komunitas angkringan dan sebagainya. Selain itu, berdasarkan wawancara dengan Manajer KSPPS BMT BIF Cabang Bugisan, komunitas tersebut juga diberikan pelatihan tentang kewirausahaan dan pengetahuan manajemen setiap 1 bulan sekali, serta diberikan pendampingan secara berkala, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi dan menambah pengetahuan tentang berwirausaha. Selain itu KSPPS BMT BIF Bugisan melakukan pendekatan spiritual dengan mengadakan pengajian anggota pembiayaan modal usaha yang diadakan sebulan sekali. Acara ini dilakukan untuk meningkatkan keimanan anggota, sekaligus menjadi ruang komunikasi antara pihak KSPPS BMT BIF Cabang Bugisan dan anggota. Dengan dibentuknya komunitas atau kelompok usaha anggota pembiayaan modal usaha dan dilakukannya pelatihan wirausaha serta pendampingan secara berkala, maka diharapkan dapat membantu meningkatkan produktifitas usaha anggota.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka diharapkan KSPPS BMT BIF Cabang Bugisan dapat mengoptimalkan perannya dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada sektor-sektor UMKM agar dapat memberdayakan masyarakat Yogyakarta khususnya pelaku usaha mikro untuk dapat meningkatkan perkembangan usaha. Pengukuran pembiayaan murabahah diukur melalui beberapa indikator antara lain besar pembiayaan, margin, jangka waktu, jumlah angsuran, dan penggunaan atau alokasi dana. Sedangkan pengukuran perkembangan usaha mikro diukur melalui beberapa indikator antara lain

jumlah produk atau barang yang dijual, jumlah pelanggan atau pembeli, pendapatan, laba usaha, perluasan usaha atau membuka cabang baru, tenaga kerja dan aset usaha. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO ANGGOTA (Studi Kasus pada KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro anggota di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan anggota usaha mikro di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait

1. Manfaat bagi lembaga diantaranya :

- a. Dapat memperkenalkan KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri kemasyarakatan

- b. Dapat meningkatkan terjalinnya hubungan kemitraan yang lebih erat antara KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri dengan Pelaku Usaha Kecil Mikro
2. Manfaat bagi akademik diantaranya :
 - a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa tentang Ekonomi Islam
3. Manfaat bagi peneliti
 - a. Peneliti berharap bahwa setelah melakukan penelitian ini tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro anggota (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Cabang Bugisan) dapat menjadi pengalaman dan wawasan dalam pengembangan ekonomi produktif dan kreatif.